

ABSTRAKSI

Awal dari krisis PT. Dirgantara Indonesia adalah ketika krisis moneter melanda Asia, nilai rupiah melemah, dan industri pesawat terbang dunia sedang lesu, untuk tetap menghidupi perusahaan-perusahaan BUMNnya, pemerintah meminjam modal ke IMF. Tapi IMF memberi syarat bahwa dana itu dikucurkan jika pemerintah memberhentikan subsidi ke PT. Dirgantara Indonesia. adanya perjanjian tersebut menyebabkan PT. Dirgantara Indonesia kesulitan dalam menjalankan roda bisnisnya, padahal gaji karyawan harus dibayar, sedangkan pesanan pesawat sedang sepi.

Krisis yang terjadi di PT. Dirgantara Indonesia adalah masalah rasionalisasi karyawan. Perusahaan yang bergerak dibidang kedirgantaraan tersebut tidak mampu lagi membayar gaji 9000 karyawannya, maka pada tanggal 11 Juli turunlah SK Dirut PT. Dirgantara Indonesia tentang rasionalisasi karyawan, Hal ini mengakibatkan konflik berkepanjangan antara mantan karyawan dengan jajaran Direksi.

Mantan karyawan yang menamakan dirinya SP-FKK melakukan perlawanan hukum terhadap Direksi dan Pemerintah karena dianggap tidak adil dalam menuntaskan kasus. Setelah melewati proses persidangan yang panjang, akhirnya Mahkamah Agung memenangkan PT. Dirgantara Indonesia terhadap Serikat Pekerja pada tanggal 23 September 2004.

Dalam menagani kasus, PT. Dirgantara Indonesia tidak hanya tinggal diam, banyak strategi yang dilakukan untuk memperbaiki citra perusahaan yang sudah terlanjur negatif oleh publik.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjalin hubungan baik dengan publik internal dan publik eksternal. Pada publik internal ditekankan untuk karyawan, sedangkan pada publik eksternal ditekankan untuk masyarakat.

Saat ini PT. Dirgantara Indonesia Dapat dikategorikan pada tahap kesembuhan, ini bisa dilihat dari strategi-strategi yang dilakukan untuk membangun kembali perusahaan.

Namun ada dua hal yang kurang diperhatikan oleh perusahaan, yaitu mantan karyawannya dan hubungan dengan pers. Program-program yang dilakukan ternyata kurang efisien membantu mantan karyawan mendapatkan pekerjaan kembali, begitu juga hubungannya dengan pihak pers, diawal krisis perusahaan menutup diri dari media sehingga isu yang berkembang merugikan PT. Dirgantara Indonesia itu sendiri.